

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meluasnya *coronavirus disease 2019* (Covid-19) dengan berbagai variannya di seluruh dunia telah mengguncang tidak hanya masalah kesehatan masyarakat tetapi juga sektor ekonomi, sosial, politik, bisnis, dan kewirausahaan. Berbagai langkah pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan telah dilakukan dan diterapkan di berbagai belahan dunia dan negara. Pemerintah dipaksa untuk menghentikan persebaran virus sambil tetap menjaga kestabilan berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Pemerintah harus mengambil langkah, dengan melakukan penerapan pembatasan sosial dan fisik, pemberhentian transportasi dan mobilitas masyarakat, karantina, penutupan batas wilayah baik negara maupun daerah. Pemerintah Indonesia dengan keharusan mempertahankan keselamatan masyarakatnya, serta menjaga keteraturan dan kestabilan berbagai bidang kehidupan, harus mengambil langkah dengan melakukan beberapa prosedur keamanan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), harus diterapkan guna menghentikan mata rantai kematian Covid-19.

Segala bentuk kegiatan masyarakat diharuskan dan dilakukan secara daring atau *online*. Berbagai kegiatan yang mengharuskan berkumpulnya sekelompok orang terpaksa dihentikan. Sekolah diliburkan, para pegawai

diwajibkan untuk melakukan pekerjaannya dari rumah masing-masing *Work From Home* (WFH). Berbagai kegiatan usaha kecil dan menengah mulai terganggu dengan peraturan yang dibuat.

Dampak dari keharusan ini menimbulkan banyak ketimpangan, kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat mulai terganggu, sayangnya dampak ini tidak hanya dirasakan di daerah-daerah yang sedang dikarantina, tetapi juga memberi dampak yang signifikan pada daerah lain disekitarnya. Dampak Pandemi Covid-19 menjadi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, karena pendapatan negara menjadi berkurang, sedangkan belanja negara meningkat.

Mengutip dari Laporan Perekonomian Provinsi NTT oleh Bank Indonesia, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami penurunan. Pada tahun 2019 tingkat pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 5,24%, kemudian dimasa Pandemi Covid-19 mengalami kontraksi sebesar 0,83%. Realisasi total belanja pemerintah (APBD) di Provinsi NTT pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp42,70 triliun, dengan persentase realisasi sebesar 89,24% dari anggaran. Persentase realisasi belanja tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penyerapan anggaran yang belum optimal di tingkat Kota dan Kabupaten. Sementara itu, realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di Provinsi NTT mencapai Rp25,10 triliun, dengan persentase realisasi sebesar 90,55% dari anggaran. Persentase realisasi pendapatan juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh

melemahnya kinerja pendapatan asli daerah, seperti pajak, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Refocusing alokasi dana transfer juga turut menurunkan pendapatan daerah, terutama pada tingkat Kota dan Kabupaten.

Dalam kurun waktu 4 tahun mulai dari 2018 sampai 2021 terjadi perubahan pada total Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi NTT. Tahun 2018 dan 2019 sebelum Pandemi Pendapatan Daerah Provinsi NTT mengalami kenaikan dari Rp.4,781 triliun, menjadi Rp.5,354 triliun. Belanja Daerah juga mengalami peningkatan dari Rp.4,846 triliun menjadi Rp.5,227 triliun. Namun pada periode terjadinya Pandemi Covid-19 yaitu 2020 sampai 2021, Pendapatan Daerah mengalami penurunan menjadi Rp.5.312 triliun. Sedangkan Belanja daerah mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu dari Rp.5,2 triliun menjadi 5,7 triliun pada 2020. Dalam keadaan normal akan sangat sederhana bagi pemerintah untuk menguraikan dan membagi setiap kebutuhan yang harus dipenuhi melalui APBD. Namun kasus Pandemi Covid-19 ini mengakibatkan sebagian besar proporsi belanja daerah dialokasikan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Banyaknya permintaan akan alat penunjang kesehatan, obat-obatan, dan kebutuhan penanganan kasus Covid-19 yang mendadak, akan mempengaruhi perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Hal tersebut tergambar nyata dalam Neraca Daftar Rekapitulasi Persediaan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Dalam menangani akibat dari adanya Pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan dana tambahan yang cukup besar pada tahun anggaran 2020 dimana menjadi tahun dengan tingkat

penularan wabah Covid-19 yang cukup besar. Pada tahun anggaran 2019, total penambahan anggaran belanja barang persediaan sejumlah Rp.129.606.189.425,45. Jumlah barang persediaan yang terpakai Rp.135.154.910.096,97. Hal ini justru berbanding terbalik dengan penambahan anggaran pada masa Pandemi Covid-19 tahun anggaran 2020. Pada tahun anggaran 2020, total penambahan anggaran belanja persediaan sebesar Rp.229.083.919.104,61 dengan total pemakaian barang persediaan sebesar Rp.229.361.632.182,44. Data berikut menunjukkan perbandingan total penambahan anggaran belanja persediaan dan total pemakaian barang persediaan pada tahun anggaran 2019 dan 2020.

Tabel 1.1.
Total Mutasi Barang Persediaan

KETERANGAN	TAHUN ANGGARAN	
	2019	2020
Total Penambahan Belanja Persediaan	Rp.129.606.189.425,45.	Rp.229.083.919.104,61
Total Pengurangan (Pemakaian Barang Persediaan)	Rp.135.154.910.096,97.	Rp.229.361.632.182,44.

Sumber: Daftar Rekapitulasi Persediaan Laporan Keu. Pemerintah Prov.NTT

Salah satu post yang terkena imbas adalah belanja persediaan, belanja persediaan akan mengalami perubahan secara signifikan, baik peningkatan ataupun penurunan. Peneliti membangun asumsi bahwa penetapan besaran belanja persediaan memperhitungkan besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik dan terpacu menganalisis, mendalami, serta mencari tahu lebih lanjut terkait dampak Pandemi Covid-19 pada belanja persediaan dari Pemerintah Daerah

dengan judul “**Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Anggaran Belanja Persediaan Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi NTT**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap Anggaran Belanja Persediaan Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi NTT.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis dampak Pandemi Covid-19 terhadap Anggaran Belanja Persediaan Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi NTT

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Penulis mampu menerapkan ilmu dan teori yang dipelajari ke dalam praktek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat
 - b. Adanya penelitian ini, penulis diharapkan mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang masalah Pandemi Covid-19, bidang kehidupan yang terdampak, langkah dan keputusan yang diambil pemerintah, dalam menyikapi bencana Covid-19

- c. Penulis mampu memahami perubahan anggaran belanja persediaan yang terjadi akibat Pandemi Covid-19
 2. Bagi Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi NTT.
 - a. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi NTT mampu meyakinkan masyarakat melalui penelitian ini, bahwa Mereka telah berusaha semaksimal mungkin mengambil, memperhitungkan, dan mempersiapkan langkah terbaik dalam pemutusan mata rantai penyebaran Virus Covid-19.
 - b. Hasil penelitian ini, dapat menjadi alat penyampaian informasi pemerintah melalui Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi NTT, kepada masyarakat yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - c. Melalui tulisan ini pemerintah melalui Dinas Kesehatan, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi NTT, dapat berbagi informasi kepada masyarakat guna menciptakan keamanan dan kestabilan, sembari mengupayakan penanganan dan pencegahan Covid-19 dengan lebih leluasa, tanpa perlu khawatir akan kesalahpahaman masyarakat.
 3. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi alat informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta dapat menjadi referensi dan tolak ukur untuk penelitian yang berkaitan dengan

pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap perubahan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi NTT lainnya.

